

## PUSTAKA ACUAN

### A. Buku

- Aartje Tehupeiory. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Penerbit Raih Asa Sukses. Jakarta. 2012.
- Adrian Sutedi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Hetty Hassanah. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. 2018.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. UIN Jakarta Press. Jakarta. 2018.
- Mudakir Iskandar. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta. 2019.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria – Kajian Komprehensif*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2012.
- Urip Santoso. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2015.

### B. Jurnal

- Abby. Fat'hul Achmadi. Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan. *Al-Adl : Jurnal Hukum* VIII (2016): 1–22.
- Apriani. Desi, and Arifin Bur. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 220–239.  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/11>.
- Arief. Anggraeny. Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 206.
- Dapar. Rifky. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 2016.  
<https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539>  
<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.029>  
[http://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda Pangolin National Conservation Strategy and Action Plan %28LoRes%29.pdf](http://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda%20Pangolin%20National%20Conservation%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20LoRes.pdf)  
<https://doi.org/10.1016/j.forec>.
- Dewi. Aliya Sandra. Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika*

*Masalah Hukum dan Keadilan* 9. no. 1 (2018): 19.

Kolompoy, Diana. Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum* VII. no. 3 (2019): 135–144.

Nasriyan, Iyan. Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10. no. 02 (2019): 87–93.

Rasmawati, Irma, Adonia Ivonne Laturette, and Pieter Radjawane. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kepada Umat Manusia. Sebagai Negara Agraris, Maka Tanah Mempunyai Arti Yang Sangat Masyarakat Yang Tertinggi, Secara Konstitusi Diatur Dalam Pasal 33 Ayat ( 3 ). *Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2022): 47–68.

Rejekiningsih, Triana. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia* 5 (2016): 298–325.

Sahat Maruli Tua Situmeang. Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*. Vol. 1. 2019.

Subekti, Rahayu. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum* 5. no. 2 (2016): 376–394.

Sudiyono, and Puput Fera Elisa. Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah Dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Fenomena* XVI (2018): 1720–1749.

Sumanto, Listyowati. Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki). *Jurnal Hukum PRIORIS* 3. no. 3 (2016): 67–102.

### **C. Situs Internet**

Roy Al Minfa. *Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan*. diakses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.05 WIB, <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>

Sofie Widyana. *Pembuktian Hak Lama Pada Pendaftaran Tanah*. diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 18.25 WIB.  
<https://hukumproperti.com/pembuktian-hak-lama-pada-pendaftaran-tanah/>